

PENGARUH ANGKATAN KERJA, UPAH, PDRB, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2002-2019

Amgi Filiasari¹

Achma Hendra Setiawan

Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

amgifilia@students.undip.ac.id

Abstract

Unemployment is a problem faced by every country. It has been recorded that from 2002 to 2019 the unemployment rate in Banten Province was always above the average national unemployment rate. This study aims to analyze the influence of the labor force, wages, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and education on the unemployment rate in Banten Province in 2002-2019.

This study uses secondary data in the form of time series data from 2002 to 2019 obtained from BPS and BPS Banten Province. The method of analysis in this study is multiple linear regression analysis with the Ordinary Least Square (OLS) regression method. The analysis tool used is E-views 9.

The results of this study indicate that the variables of labor force, wages, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have a negative and significant effect on the unemployment rate in Banten Province while the education variable has a positive and significant effect on the unemployment rate in Banten Province. The dominant variable affecting on the unemployment rate in Banten Province in 2002-2019 is education.

Keywords: unemployment rate, labor force, wages, GRDP, education.

PENDAHULUAN

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui tingkat pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sukirno, 2006). Pengangguran merupakan permasalahan yang kompleks karena mempengaruhi atau dipengaruhi oleh indikator ekonomi lainnya dan pengangguran dikatakan normal apabila berada pada kisaran 4 persen. Indikator yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Dalam perkembangannya tingkat pengangguran terbuka Indonesia berfluktuasi dari tahun 2002-2019, namun sejak tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka telah mengalami penurunan. Walaupun pada tingkat nasional, rata-rata tingkat pengangguran telah mencapai angka 5 persen namun di beberapa provinsi, tingkat pengangguran regional justru melebihi tingkat pengangguran nasional. Salah satunya adalah Provinsi Banten, bahkan tingkat pengangguran terbuka pernah mencapai angka 18,91 persen ditahun 2006.

¹ *Corresponding author*

Provinsi Banten merupakan wilayah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2000. Sebagai provinsi baru, Provinsi Banten terus berupaya mendorong perekonomiannya melalui pembangunan di berbagai bidang. Lapangan kerja yang tersedia ternyata tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada sehingga menyebabkan tingkat pengangguran Provinsi Banten tergolong tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pengangguran nasional.

Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten Tahun 2002-2019

Tahun	TPT (%)	
	Banten	Indonesia
2002	14,15	9,06
2003	14,18	9,67
2004	14,31	9,86
2005	16,59	11,24
2006	18,91	10,28
2007	15,75	9,11
2008	15,18	8,39
2009	14,97	7,87
2010	13,68	7,14
2011	13,06	6,56
2012	10,13	6,14
2013	9,54	6,17
2014	9,07	5,94
2015	9,55	6,18
2016	8,92	5,61
2017	9,28	5,5
2018	8,52	5,34
2019	8,11	5,28

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sepanjang tahun 2002-2019 tingkat pengangguran di Provinsi Banten selalu berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional. Bahkan di tahun 2018 dan 2019 tingkat pengangguran Provinsi Banten menempati posisi pertama se-Indonesia. Adapun indikator yang mempengaruhi pengangguran diantaranya:

Angkatan kerja, kenaikan jumlah penduduk terutama akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang banyak ini diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan (Anggoro dan Soesatyo, 2015). Pada angkatan kerja dapat diketahui besaran persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah yaitu melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dapat memberikan gambaran struktur dan keadaan angkatan kerja pada masa mendatang. Terjadi peningkatan angkatan kerja tiap tahunnya sedangkan untuk pertumbuhannya negatif di

beberapa tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai sekitar 21,9 persen dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun tahun 2002-2019 sebesar 3,5 persen. Sedangkan pada TPAK justru berfluktuasi. TPAK tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 67,79 persen dengan rata-rata pertumbuhan TPAK sepanjang tahun 2002-2019 sebesar 1,3 persen. Hal ini terjadi karena adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Upah, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai (Aruan dan Sriyono, 2016). Menurut Kaufman dan Hotchkiss (dikutip dari Prawira, 2018), terdapat hubungan antara upah dengan pengangguran di mana semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja. Apabila upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan menambah pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran. Kenaikan upah tentunya merupakan hal menggembirakan bagi pekerja namun di sisi lain dapat merugikan bagi pengusaha. Sepanjang tahun 2002-2019, upah minimum provinsi yang ditetapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 11,6 persen.

PDRB digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Amrullah, dkk (2019) apabila terjadi peningkatan PDRB berarti telah terjadi kenaikan produksi barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah naiknya permintaan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Banten dalam kurun waktu 2002-2019 berfluktuasi dan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen terjadi pada tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sepanjang tahun 2002-2019 sebesar 5,79 persen. Provinsi Banten tumbuh dan berkembang sebagai kawasan industri di mana banyak industri besar berlokasi seperti Modern Cikande, Pancamata dan sektor industri menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Provinsi Banten selama kurun waktu 2002-2019 yaitu sebesar 44,76 persen dengan perhitungan atas dasar harga konstan tahun 2000. Banyaknya industri yang tumbuh membuat lapangan pekerjaan terbuka luas bagi penduduk Provinsi Banten khususnya namun pencari kerja tidak hanya berasal dari Provinsi Banten saja melainkan pencari kerja dari luar seperti DKI Jakarta ataupun Jawa Barat menciptakan persaingan akan lapangan kerja semakin ketat.

Pendidikan merupakan suatu investasi pada bidang sumber daya manusia yang akan dirasakan pada masa mendatang. Pendidikan akan meningkatkan kualitas dan produktivitas seseorang sehingga peningkatan kualitas ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi pekerja tersebut (Sang, 2017). Saat ini untuk menggambarkan kualitas pendidikan di suatu wilayah digunakan rata-rata lama sekolah. Sepanjang tahun 2002-2019 rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten mencapai 8 tahun atau setara dengan kelas dua SMP. Hartanto (2017) mengemukakan bahwa untuk tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan kesulitan memasuki dunia kerja yang membutuhkan keahlian dan rata-rata lama sekolah minimal 12 tahun bahkan lebih hal ini dapat menyebabkan meningkatnya pengangguran. Tingkat pengangguran menurut

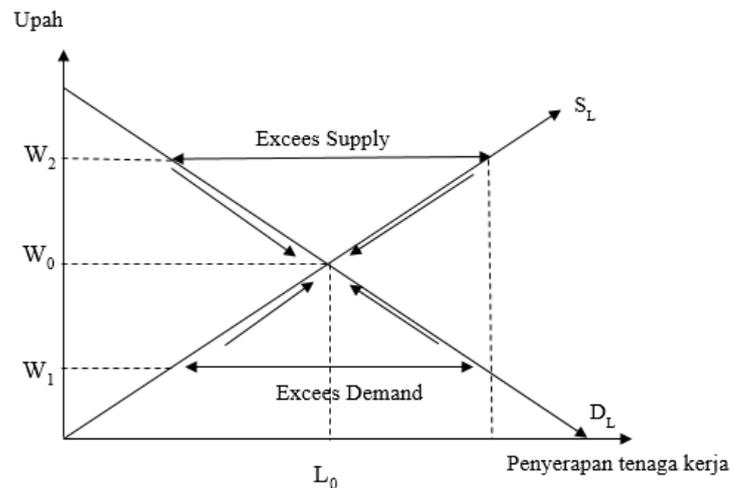
pendidikan justru didominasi oleh lulusan SMA dan SMK dengan kontribusi sebesar 12-14 persen disepanjang tahun 2014-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menciptakan keseimbangan pasar tenaga kerja. Pada titik W_0 menunjukkan keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada saat tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu sama besarnya yang diminta oleh perusahaan, Pada titik L_0 menunjukkan terjadinya *full employment* atau kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja secara penuh yang berarti pada tingkat upah ekuilibrium tersebut semua angkatan kerja yang menginginkan pekerjaan akan memperoleh pekerjaan atau pada hal ini tidak terdapat pengangguran, kecuali pengangguran secara sukarela (Siregar dan Sukwika, 2007).

Gambar 1
Kurva Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja



Sumber: Siregar dan Sukwika

Hukum Okun

Arthur Okun mengemukakan sebuah teori yang dikenal dengan Hukum Okun yaitu mempelajari hubungan antara tingkat pengangguran dengan GDP, sedangkan pada skala yang lebih kecil lingkungannya disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berarti peningkatan pendapatan daerah. Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, maka angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan GDP.

Human Capital

Asumsi dasar teori *Human Capital* adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Teori *Human Capital* juga cenderung menyamakan tingkat pengetahuan pekerja dengan tingkat sekolah formal mereka. Hal ini

dapat mengindikasikan bahwa dengan melihat lama sekolah seseorang dapat mengestimasi *economic individual return* (yang berupa pendapatan) dari pembelajaran yang diperoleh (Sang, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data *time series* dari tahun 2002 hingga 2019 yang diperoleh dari BPS dan BPS Provinsi Banten.

Definisi Operasional

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Seseorang yang termasuk penduduk usia kerja atau angkatan kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan.

Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad (1)$$

2. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja tetapi sedang mencari kerja. Variabel angkatan kerja dalam penelitian ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yaitu persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah (dinyatakan dalam satuan persen).

Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad (2)$$

3. Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang diterapkan atas dasar suatu persetujuan atau perundang-undangan (Sumarsono, 2003). Variabel upah dalam penelitian ini adalah upah minimum provinsi yang berlaku di Provinsi Banten (dinyatakan dalam satuan rupiah).

4. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu (BPS, 2015). PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan tahun 2000 (dinyatakan dalam satuan rupiah).

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan bentuk investasi pada bidang sumber daya manusia yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil kerja (Simanjuntak, 2001). Variabel pendidikan pada penelitian ini adalah rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (dinyatakan dalam satuan persen).

Metode Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square* (OLS)) dengan alat analisis yang digunakan adalah E-

views 9 dan dilakukan deteksi penyimpangan asumsi klasik meliputi normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas serta pengujian statistik. Model persamaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\ln TP = \beta_0 + \beta_1 \ln AK + \beta_2 \ln UMP + \beta_3 \ln PDRB + \beta_4 \ln PDN + u \tag{3}$$

Dimana:

- TP : Tingkat Pengangguran Provinsi Banten (Persen)
- AK : Angkatan Kerja Provinsi Banten (Persen)
- UMP : Upah Minimum Provinsi Banten (Rupiah)
- PDRB : PDRB Provinsi Banten (Rupiah)
- PDN : Pendidikan (Tahun)
- β_0 : Konstanta
- β_1 : Konstanta Angkatan Kerja
- β_2 : Konstanta Upah Minimum Provinsi
- β_3 : Konstanta PDRB
- β_4 : Konstanta Pendidikan
- u : Faktor Pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik

Berdasarkan identifikasi, model penelitian ini telah bebas dari masalah asumsi klasik maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: lnTP
 Method: Least Squares
 Date: 10/18/20 Time: 05:41
 Sample: 2002 2019
 Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.486863	0.017535	141.8259	0.0000
lnAK	-0.119894	0.009583	-12.51128	0.0000
lnUMP	-0.138133	0.027458	-5.030645	0.0002
lnPDRB	-0.361739	0.129192	-2.800004	0.0150
lnPDN	1.363010	0.298825	4.561237	0.0005
R-squared	0.941830	Mean dependent var	2.486863	
Adjusted R-squared	0.923932	S.D. dependent var	0.269732	
S.E. of regression	0.074393	Akaike info criterion	-2.128774	
Sum squared resid	0.071946	Schwarz criterion	-1.881448	
Log likelihood	24.15896	Hannan-Quinn criter.	-2.094671	
F-statistic	52.62110	Durbin-Watson stat	1.809647	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan pada nilai R-squared sebesar 0,941830 yang berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 94,18 persen dan 5,82 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model ataupun kesalahan pengukuran pada variabel.

Uji-F

Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil yaitu F-hitung (52,6) > F-tabel (3,18) dan nilai probabilitas F-hitung (0,00) < (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja, upah, PDRB, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Uji-t

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Dilakukan dengan melihat nilai t-statistic maupun nilai probabilitas dari masing variabel. Diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,77 dan menggunakan tingkat signifikansi 5 persen maka dari hasil penelitian pada Tabel 2 diperoleh hasil bahwa seluruh variabel independen yaitu angkatan kerja, upah, PDRB, dan pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten.

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran

Angkatan kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini ditunjukkan nilai t-hitung sebesar 12,5 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,112 yang artinya setiap peningkatan elastisitas angkatan kerja sebesar 1 persen maka akan menyebabkan elastisitas tingkat pengangguran menurun sebesar 0,112 persen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran ditolak.

Saat terjadi kenaikan jumlah penduduk menandakan adanya peningkatan angkatan kerja maka bagi perusahaan akan lebih mudah mendapatkan tenaga kerja dan upah yang ditawarkan perusahaan menjadi rendah karena terjadinya kelebihan penawaran pekerjaan sehingga pekerja akan berlomba mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan data angkatan kerja di Provinsi Banten, tingkat partisipasi angkatan kerja berfluktuasi dengan menunjukkan tren positif yaitu dari tahun 2002 angka TPAK mencapai 52,57 persen dan di tahun 2019 menjadi 64,52 persen. Dengan diikuti tingkat pengangguran yang menurun, dari tahun 2002 yang mencapai 14,15 persen dan di tahun 2019 tingkat pengangguran mencapai 8,11 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) dan Khotimah (2018) yang menyatakan angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Pengaruh Upah terhadap Tingkat Pengangguran

Upah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini ditunjukkan pada nilai t-hitung sebesar 5,03 dan nilai probabilitas sebesar 0,0002 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,138 yang arti setiap peningkatan elastisitas upah sebesar 1 persen maka akan menyebabkan elastisitas tingkat pengangguran menurun sebesar 0,138 persen. Dengan demikian hipotesis yang

menyatakan upah berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori upah minimum di pasar kompetitif yang menyatakan upah minimum akan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Kenaikan upah minimum akan memacu individu untuk mencari pekerjaan dan langsung menerima tawaran pekerjaan yang ada sehingga akan mengurangi pengangguran (Kuntiarti, 2018). Kenaikan upah minimum juga akan memotivasi dan membantu masyarakat untuk mendapatkan upah yang layak (Sembiring dan Sasongko, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan Sasongko (2019) dan Putri (2016) menyatakan upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran

PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini ditunjukkan pada nilai t-hitung sebesar 2,80 dan nilai probabilitas sebesar 0,0150 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien sebesar -0,362 yang arti setiap peningkatan elastisitas PDRB sebesar 1 persen maka akan menyebabkan elastisitas tingkat pengangguran menurun sebesar 0,362 persen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran diterima.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran yang menjelaskan setiap penurunan 2 persen GDP maka pengangguran akan naik sebesar 1 persen. Menurut Amrullah, dkk (2019) apabila terjadi peningkatan PDRB berarti telah terjadi kenaikan produksi barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah naiknya permintaan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran.

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priastiwani dan Handayani (2019) dan Amrullah, dkk (2019) yang menyatakan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran

Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini ditunjukkan pada nilai t-hitung sebesar 4,56 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 1,363 yang berarti setiap peningkatan elastisitas pendidikan sebesar 1 persen maka akan menyebabkan elastisitas tingkat pengangguran meningkat sebesar 1,363 persen. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran ditolak.

Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran yang berarti apabila pendidikan mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran akan menurun. Hajji dan Nugroho (2013) mengemukakan peningkatan pendidikan akan membuat masyarakat menuntut upah lebih tinggi sesuai dengan apa yang individu tersebut inginkan. Jika perusahaan tidak memberikan upah yang sesuai individu tersebut akan memilih menunggu pekerjaan yang sesuai.

Jika melihat fenomena pengangguran yang terjadi di Provinsi Banten, selama 6 tahun terakhir pengangguran justru didominasi oleh lulusan SMA dan SMK.

Ketidaksesuain kualifikasi dengan lowongan pekerjaan yang ada menyebabkan banyak lulusan SMA dan SMK menganggur. Terutama lulusan SMK yang dipersiapkan untuk bekerja setelah lulus nantinya justru memberikan kontribusi terbesar dibandingkan lulusan lainnya terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Adanya pergeseran kualifikasi permintaan tenaga kerja dari pendidikan rendah menjadi berpendidikan menengah dan tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran pada lulusan SMA dan SMK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suaidah (2013) dan Prawira (2018) yang menyatakan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Angkatan Kerja, Upah, PDRB, dan Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019.
2. Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019.
3. Upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019.
4. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019.
5. Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten tahun 2002-2019.

Saran

Pada bidang pendidikan diharapkan lebih banyak berbasis pendidikan vokasi yang lebih menekankan pada keterampilan terutama bagi SMK yang mana lulusan ini lebih dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja. Pendidikan vokasi erat kaitannya dengan pelatihan, pengembangan *softskill dan hardskill* yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.

Dikarenakan minimnya variabel yang digunakan maka pada penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti investasi dan IPM yang diduga berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten

REFERENSI

- Amrullah, W. A., Istiyani, N., dan Muslihatinningsih, F. (2019). Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2007-2016. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 43-49.
- Anggoro, M. H., dan Soesatyo, Y. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3), 1-13.
- Aruan, N. L., dan Sriyono, D. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 1985-2011. *Modus*, 26(2), 173-187.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Produk Domestik Regional Bruto*, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik. (2020). Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 1986-2019. <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2020/02/19/1774/tingkatpengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986-2019.html>. Diakses tanggal 15 Juli 2020.
- Hajji, M. S., dan Nugroho (2013). Analisis PDRB, Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990-2011. *Diponegoro Journal of Economics*, 2, 1–10.
- Hartanto, T. B. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Dan Kotaprovisi Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 21–30.
- Khotimah, K. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di DIY Tahun 2009-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7, 599–609.
- Kuntiarti, D. D. (2018). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk Dan Kenaikan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2010-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(1), 1–9.
- Nugroho, R. E. (2016). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Di Indonesia Periode 1998 – 2014. *Jurnal PASTI*, 10(2), 177–191.
- Prawira, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran Terbuka Di Indonesia. *EcoGen*, 1(1), 162–168.
- Priastiwi, D., dan Handayani, H. R. (2019). Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 159–169.
- Putri, D. A. (2016). Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2003-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–8.
- Sang, A. (2017). Pengaruh Human Capital Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja. *Parameter*, 1(2), 1-17.
- Sembiring, V. B. P., dan Sasongko, G. (2019). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto , Inflasi , Upah Minimum , dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 – 2017*. 3(4), 430–443.
- Simanjuntak, Payaman J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Manusia*. Jakarta: FE UI.
- Siregar, H., dan Sukwika, T. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pasar Tenaga Kerja Dan Implikasi Kebijakannya Terhadap Sektor Pertanian Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1–22.
- Suaidah, I. (2013). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1-16.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.